

**COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE OF RURAL CREDIT BANKS (BPR) BEFORE  
AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN  
JAMBI PROVINCE**

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEBELUM DAN  
SESUDAH PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI  
PROVINSI JAMBI**

Oleh:

Adi Surahmat<sup>1)</sup> Mukhzarudfa<sup>2)</sup> Yudi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> *Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020,*

<sup>2&3)</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*

Email: <sup>1)</sup> [adi.surahmat@gmail.com](mailto:adi.surahmat@gmail.com) <sup>2)</sup> [Mukhzarudfa@unja.ac.id](mailto:Mukhzarudfa@unja.ac.id) <sup>3)</sup> [yudi.telanai@gmail.com](mailto:yudi.telanai@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to look at financial performance and explain the financial performance comparison of Rural Credit Banks in Jambi Province before and after the implementation of governance and determine compliance with the implementation of governance provisions by Rural Credit Banks in Jambi Province, as measured through the Earning Assets Quality Ratio (KAP) Net Non Performing Loans (NPLs) Ratio, Return on Assets (ROA) Ratio, Operating Cost Ratio (BOPO), Loan To Deposit Ratio (LDR) and Cash Ratio (CR). This research is a quantitative descriptive study with data sourced from Bank Perkreditan Rakyat publication reports. Hypothesis testing will use descriptive statistics, Normality Test and Paired Sample T-test. In addition, the researcher also conducted a survey to the Rural Bank to see the level of compliance with governance provisions. The results showed that the financial performance of 15 Rural Credit Banks before and after the implementation of governance was considered insignificant and the results of the different tests used Paired Sample T-test to KAP Ratio, Net NPL Ratio, ROA Ratio, BOPO Ratio, LDR and Cash Ratio to all The Rural Credit Bank in Jambi Province shows no difference in financial performance. However, the survey results show an increase in compliance of the Rural Credit Bank in meeting the conditions required by the OJK in accordance with the specified deadline.*

*Keywords: Financial Performance, Good Corporate Governance, Capital Adquacy Ratio (CAR), Earning Asset Quality Ratio (KAP), Net Non Performing Loan (NPL) Ratio, Return on Asset (ROA) Ratio, Operational Cost Ratio in Operational Income (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Cash Ratio (CR).*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kinerja keuangan dan memaparkan perbandingan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan tata kelola serta mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jambi, yang diukur melalui Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Net, Rasio *Return on Asset* (ROA), Rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan To Deposit Ratio* (LDR) dan *Cash Ratio* (CR). Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan data bersumber dari laporan publikasi Bank Perkreditan Rakyat. Pengujian hipotesis akan menggunakan statistik deskriptif, Uji Normalitas dan Uji *Paired Sample T-test*. Selain itu, Peneliti juga melakukan survey ke Bank Perkreditan Rakyat untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada 15 Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan sesudah penerapan tata kelola dinilai tidak signifikan dan hasil uji beda menggunakan *Paired Sample T-test* terhadap Rasio KAP, Rasio *NPL Net*, Rasio ROA, Rasio BOPO, LDR dan *Cash Ratio* kepada seluruh Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jambi memperlihatkan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan. Namun demikian, hasil survey memperlihatkan adanya peningkatan kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, *Capital Adquacy Ratio* (CAR), Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Net, Rasio *Return on Asset* (ROA), Rasio Biaya Operasional pada *Pendapatan Operasional* (BOPO), *Loan To Deposit Ratio* (LDR) dan *Cash Ratio* (CR).

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Industri keuangan dalam beberapa dekade terakhir berkembang sangat pesat ditandai munculnya beraneka ragam jenis industri keuangan yang menawarkan produk dan jasa keuangan bagi masyarakat umum yang membutuhkan layanan jasa keuangan. Industri keuangan di Indonesia di atur dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbankan merupakan industri keuangan terbesar saat ini dengan aset kelola sekitar Rp8.300 triliun. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam undang tersebut terdapat 2 (dua) kategori bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No 10, 1998).

Kegiatan usaha perbankan dalam kegiatan operasionalnya sering terjadi adanya risiko-risiko terhadap bisnis dan penyimpangan sehingga diperlukan pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Kasus-kasus penyimpangan di bank umum yang pernah terjadi di Indonesia dan terpublikasi secara luas antar lain penggelapan dana kredit di Bapindo yang dilakukan oleh Sdr. Eddy Tansil dengan kerugian mencapai Rp1,3 triliun di kisaran tahun 1993(www.nasional.kompas.com, n.d.) dan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Karyawan Citibank atas nama Inong Malinda Dee, dengan cara memanfaatkan posisi sebagai karyawan di bagian *Private Banking* (www.nasional.tempco.id, n.d.)

Pasca krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997-1998 dan banyaknya permasalahan *fraud* yang terjadi di bank umum, Otoritas Pengawasan melakukan beberapa perubahan kebijakan dan metode pengawasan khususnya bank umum antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesi (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang kemudian saat ini telah dicabut oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (BI, 2007)(OJK, 2015a)

Penyimpangan-penyimpangan juga terjadi di BPR, seperti dalam berbagai pemberitaan berikut ini:

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengatakan bahwa banyak indikasi pidana yang terjadi di BPR terlihat setelah penutupan beberapa BPR dalam periode beberapa tahun terakhir(www.keuangan.kontan.co.id, n.d.) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa sampai dengan triwulan 3 2016, 80% BPR yang ditutup di Indonesia mayoritas dikarenakan adanya penyimpangan khususnya dari pihak internal. (www.economy.okezone.com, n.d.)

OJK sebagai lembaga pengawasan industri keuangan akhirnya melakukan evaluasi guna perbaikan terhadap BPR dengan menerbitkan ketentuan tata kelola bagi BPR yaitu POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.(OJK, 2016)

Penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal. BPR besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan tata kelola secara penuh termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPR kecil, penerapan tata kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi-fungsi yang wajib dibentuk dalam ketentuan tata kelola dengan baik. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris untuk BPR besar terdiri dari Pihak Independen dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan Pihak Independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerapan Tata Kelola.(OJK, 2015b)

Provinsi Jambi dengan wilayah yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, saat ini berdiri 19 BPR yang mayoritas ada di Kota Jambi. Aset BPR di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari posisi Desember 2013 yang tercatat sebesar Rp724 miliar menjadi sebesar Rp907 miliar posisi Desember 2018. Peningkatan asset mayoritas didukung dengan pertumbuhan kredit yang berada di sisi aktiva dan dana pihak ketiga di sisi pasiva. Kredit mengalami peningkatan dari posisi Desember 2013 yang tercatat sebesar Rp538 miliar menjadi sebesar Rp687 miliar posisi Desember 2018. Peningkatan kredit memperlihatkan bahwa BPR di Provinsi Jambi cukup berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai

lembaga intermediasi. Peningkatan juga terjadi pada dana pihak ketiga dari posisi Desember 2013 yang tercatat sebesar Rp523 miliar menjadi sebesar Rp654 miliar posisi Desember 2018. Bagi BPR, sumber utama peningkatan dana pihak ketiga mayoritas berasal dari deposito mengingat suku bunga yang ditawarkan jauh di atas suku bunga deposito dari bank umum.

Publikasi yang diterbitkan dari LPS memperlihatkan bahwa di Provinsi Jambi telah terdapat 1 (satu) BPR yang di Likuidasi oleh LPS atas pencabutan izin usaha yang diterbitkan oleh OJK, yaitu PT BPR Bungo Mandiri di Kabupaten Bungo tertanggal 8 Desember 2014 (Www.lps.go.id, n.d.). Dari pemberitaan media, penutupan PT BPR Bungo Mandiri dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi BPR dengan membuat kredit fiktif sebesar Rp3 miliar (www.finansial.bisnis.com, n.d.) sehingga rasio CAR BPR turun dibawah rasio yang dipersyaratkan OJK dan pemegang saham tidak mampu melakukan penambahan modal disetor.

Penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan baik pada perbankan maupun perusahaan lainnya khususnya dalam rangka melihat peran GCG terhadap kinerja keuangan telah dilakukan.

(Pratomo & Sari, 2014) menemukan hasil yang berbeda-beda antara 1 (satu) bank dengan bank lainnya (diantara bank milik pemerintah) serta perbedaan antara 1 (satu) rasio dengan rasio lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data dari 4 (empat) bank milik pemerintah yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri dan BNI tidak memiliki perbedaan yang signifikan setelah penerapan GCG. Sedangkan BRI dan BTN memiliki perbedaan yang signifikan setelah penerapan GCG. (Zamani & Moeljadi, 2012) menemukan hasil bahwa terdapat perbedaan kondisi kinerja keuangan setelah diterapkannya mekanisme Good Corporate Governance (GCG) pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Sari, 2009) menemukan hasil bahwa jika dilihat dari rasio Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods (CP), Perputaran Persediaan (PP) dan Perputaran Total Asset/ Total Asset Turn Over (TATO) tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan prinsip GCG sedangkan indikator kinerja keuangan yang diukur dari Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset menunjukkan perbedaan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Petrokimia Gresik dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yakni 4,9%. Penelitian lainnya, (Wulaningrum, 2010) menemukan hasil bahwa penerapan GCG pada perbankan di Indonesia mengurangi tindakan manajemen laba sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengurus BPR dalam mengelola perusahaan dihadapi oleh persaingan bisnis yang ketat, tuntutan pemegang saham yang besar sebagai pemilik

khususnya rentabilitas dan perkembangan teknologi sehingga terkadang mempengaruhi perilaku dan sifat pengurus BPR dalam melakukan kegiatan operasional yang bermuara pada terjadinya penyimpangan atau fraud. Khusus untuk BPR di Provinsi Jambi, meskipun mengalami peningkatan dari beberapa pos utama kinerja keuangan, namun dilihat dari sisi rasio keuangan terjadi perbedaan antara periode tahun 2013 s.d 2018. Pada tahun 2013 s.d 2015 sebelum diterapkannya ketentuan tata kelola oleh OJK, ROA cenderung menurun namun BOPO dinilai cenderung membaik. NPL Net juga mengalami peningkatan dalam periode sebelum diterapkannya tata kelola di BPR. Namun setelah diterapkannya BPR di periode 2016 s.d 2018, beberapa rasio keuangan cenderung stabil meskipun NPL Net mengalami peningkatan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan tata kelola.
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan tata kelola.
3. Berapa besar indeks penerapan tata kelola oleh BPR di Provinsi Jambi setelah diterbitkannya ketentuan tata kelola oleh OJK.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan GCG.
2. Untuk menguji dan menganalisis tingkat perbedaan kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan GCG.
3. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan dan penerapan tata kelola oleh BPR berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK.

## 2. TINJAUAN PUSTKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Bank Perkreditan Rakyat

Kategori bank di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara umum ada 2 (dua) yaitu bank umum dan BPR. Bank umum biasa dinamakan juga bank komersil yang kemudian dikelompokkan menjadi bank devisa dan bank non devisa. BPR merupakan bank yang melayani masyarakat kecil di daerah-daerah pedesaan. BPR dahulunya berasal dari Lumbung Desa, Lumbung Pitih Nagari, Bank Desa, Bank Pasar dan kemudian menjadi BPR. Ruang lingkup usaha BPR juga dibatasi tidak seperti bank umum (Kasmir, 2014). BPR sebagaimana

tertera dalam Undang-Undang tersebut di atas, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2.2. Good Corporate Governance (Tata Kelola)

Tata kelola perusahaan adalah satu alat tersebut untuk mencapai tujuan ini dan untuk melindungi kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Ini melibatkan promosi kepatuhan hukum dalam surat dan semangat, dan menunjukkan perilaku etis. Kerangka kerja perusahaan tata kelola mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan juga membutuhkan pertanggungjawaban untuk pengelolaannya sumber daya. Tiga unsur utama tata kelola perusahaan adalah - Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Pengelolaan (Anggarawal, 2013).

*Corporate Governance* adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, menyebutkan bahwa Tata kelola adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, mensyaratkan tata kelola di BPR minimal memuat hal-hal berikut:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. batas maksimum pemberian kredit;
8. rencana bisnis BPR;
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## 2.3. Teori Keagenan

Teori agensi bermula dari adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dengan para manajer yang ditunjuk oleh pemegang saham dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manajer dikarenakan bertindak sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pemilik Teori agensi secara teori manajemen keuangan berhubungan dengan pemisahan fungsi yang dalam manajemen keuangan membahas adanya hubungan agensi, yaitu hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Hubungan agensi seperti ini rawan konflik, yaitu konflik kepentingan pribadi (konflik agensi). Konflik tersebut terjadi karena pemilik modal berusaha menggunakan dana sebaik-baiknya dengan risiko sekecil mungkin, sedangkan manajer cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk memaksimalkan keuntungan yang sering bertentangan dan cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Praktik teori agensi ini mungkin terjadi di lingkungan perbankan khususnya di BPR. Hal ini dikarenakan BPR memiliki ruang lingkup yang kecil dan kekuasaan Direksi sebagai agen sangat besar dalam membuat kebijakan dan mengatur kegiatan operasional dan lemahnya pengendalian akibat belum adanya fungsi-fungsi yang seharusnya ada di sebuah bank, antara lain fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal. Kondisi tersebut yang membuat penyimpangan-penyimpangan sering terjadi karena tidak adanya pemisahan fungsi dan tidak ada laporan serta kegiatan yang wajib disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selayaknya bank umum.

## 2.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu alat analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Rasio keuangan terbagi dalam 4 kelompok rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas (Munawir, 2012), antara lain:

1. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
3. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.
4. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

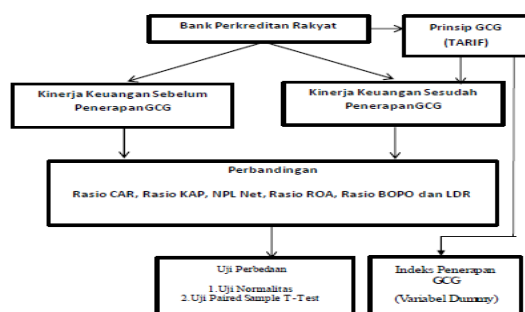
- H0.3: Tidak ada perbedaan Rasio NPL Net Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- H0.4: Tidak ada perbedaan Rasio ROA Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- H0.5: Tidak ada perbedaan Rasio BOPO Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- H0.6: Tidak ada perbedaan LDR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- H0.7: Tidak ada perbedaan CR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.

Sebagai hipotesis alternatif:

- Ha.1: Ada perbedaan CAR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- Ha.2: Ada perbedaan Rasio KAP Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- Ha.3: Ada perbedaan Rasio NPL Net Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- Ha.4: Ada perbedaan Rasio ROA Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- Ha.5: Ada perbedaan Rasio BOPO Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- Ha.6: Ada perbedaan LDR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- Ha.7: Ada perbedaan CR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

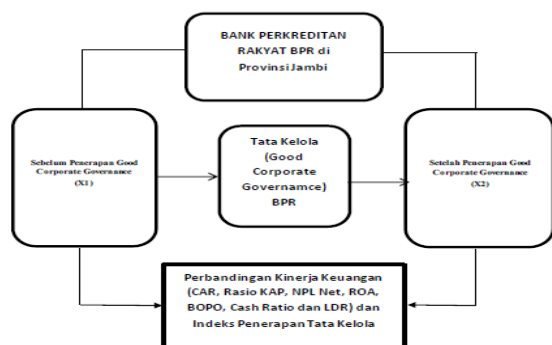
Kerangka Pemikiran penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.6. Model Penelitian

Model penelitian menguji perbedaan kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi, dengan menggunakan rasio-rasio berikut: sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

## 2.7. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H0.1: Tidak ada perbedaan CAR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
- H0.2: Tidak ada perbedaan Rasio KAP Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan melihat kinerja keuangan BPR yang ada di Provinsi Jambi sehingga penelitian ini bersifat deskriptif dengan data kuantitatif yang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan yang bersumber dari laporan publikasi BPR di Provinsi Jambi.

Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis, membandingkan dan menguraikan data-data yang dikumpulkan sehingga juga bersifat komperatif. Melalui penelitian komparatif diharapkan dapat menguji kebenaran hipotesis yang dirumuskan untuk melihat perbandingan kinerja BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

### 3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian (Arikunto, 2013). Objek penelitian ini yaitu kinerja keuangan BPR yang ada di Provinsi Jambi yaitu kinerja keuangan sebelum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (X1) dan kinerja keuangan sesudah penerapan prinsip *Good Corporate Governance*

(X2). Semua variable akan menggunakan skala rasio yang diperoleh dari laporan publikasi.

Subjek penelitian adalah subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2013). Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Provinsi Jambi.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subyek penelitian. Penelitian ini menjadikan semua BPR yang ada di Provinsi Jambi sebagai populasi dan juga sebagai sampel atau disebut dengan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang sangat ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sujarweni, 2016).

Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten/kota dengan luas wilayah mencapai 50.058 km<sup>2</sup>. Meskipun wilayah sangat luas, namun ternyata di Provinsi Jambi hanya memiliki 19 (sembilan belas) BPR yang mayoritas berada di Kota Jambi.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sifatnya kuantitatif berupa angka-angka rasio kinerja keuangan berupa *Capital Adquacy Ratio* (CAR), Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Net, Rasio Return on Asset (ROA), Rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), Loan To Deposit Ratio (LDR) dan *Cash Ratio* (CR) bersumber dari data Laporan Keuangan Publikasi BPR yang telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan ditempelkan di dinding papan pengumuman BPR.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh. Data-data tersebut bersumber dari laporan publikasi BPR tahun 2013 s.d tahun 2018 dan data-data keuangan publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diunduh dari web resmi ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2019). Pembatasan periode data, dimaksudkan agar terjadi kesesuaian periode data sebelum (tahun 2013 s.d 2015) dan sesudah penerapan tata kelola (2016 s.d 2018) di BPR. Selain itu dalam rangka melihat survey kesesuaian tata kelola, peneliti juga membuat survey dalam bentuk kuisisioner yang dikirimkan ke seluruh BPR.

### 3.6. Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang berupa rasio-rasio keuangan yang biasa digunakan dalam menilai kesehatan suatu bank. Variabel-variabel tersebut secara garis besar dibagi atas variabel kinerja

keuangan BPR sebelum penerapan Good Corporate Governance (X1) dan variabel kinerja keuangan BPR setelah penerapan Good Corporate Governance (X2). Rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dan masih berdasarkan ketentuan lama dari Bank Indonesia yang belum dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

#### a. Capital Adquency Ratio (CAR)

CAR atau Rasio KPMM memperlihatkan seberapa besar modal yang dimiliki dapat menyerap risiko atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang sudah ditempatkan.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100$$

#### b. Non Performing Loan (NPL) Net

NPL Net yaitu rasio NPL yang telah memperhitungkan pembentukan penyisihan aktiva produktif (PPAP) yang telah dibentuk BPR.

$$NPL \text{ Net} = \frac{\text{Kredit Bermasalah-PPAP}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$

#### c. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah salah satu faktor penilaian membaik atau memburuknya aktiva produktif yang dimiliki BPR.

$$KAP = \frac{\text{APYD}}{\text{AP}} \times 100$$

#### d. Return On Asset (ROA)

Rasio ROA adalah perbandingan jumlah laba dibandingkan dengan rata-rata aktiva.

$$ROA = \frac{\text{Jumlah laba}}{\text{Rata-rata aktiva}} \times 100$$

#### e. Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Beban Operasional per Pendapatan Operasional adalah perbandingan antara beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

#### f. Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR adalah perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito).

$$LDR = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

g. *Cash Ratio* (CR)

Cash Ratio merupakan rasio kecukupan alat likuid yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban lancer.

$$CR = \frac{\text{Kas} + \text{Giro} + (\text{Tab. ABA} - \text{Tab. ABP})}{\text{Kew. Segera} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}} \times 100$$

Kew. Segera + Tabungan + Deposito

3.7. Pengujian Hipotesis

a. Statistik Deskriptif

Peneliti mencoba mengumpulkan data indeks penerapan tata kelola oleh BPR berdasarkan ketentuan OJK. Hasil dari indeks tersebut akan diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan hasil penelitian. Indeks yang akan diukur menggunakan variable dummy dengan angka indeks yaitu angka 0 (nol) belum diterapkan dan angka 1 (satu) sudah diterapkan.

b. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak. Penggunaan uji normalitas dikarenakan analisis penelitian ini menggunakan statistic paramterik berupa pengukuran data yang bersifat rasio. Salah satu metode dalam uji normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov Test. Uji Kolmogorov Smirnov merupakan salah satu pengujian normalitas yang paling banyak digunakan dikarenakan metode yang relative sederhana dan cukup baik (Sujarweni, 2016).

Taraf signifikan tercatat sebesar 0,05, data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5%. Untuk pengambilan keputusan dengan pedoman (Sujarweni, 2016):

- o Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, distribusi data tidak normal.
- o Nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, distribusi data adalah normal.

Jika hasil pengujian signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan atau dengan kata lain tidak normal. Sebaliknya, jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau data dinilai normal.

c. Uji *Paired Sample T-Test*

Penelitian ini melakukan analisa dengan membandingkan kinerja keuangan yang menggunakan data rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan GCG di BPR, oleh karena itu menggunakan Uji *Paired Sample T-Test* yang uji untuk membandingkan mean dari dua sampel yang berhubungan atau dua sampel berpasangan (*paired*).

Dalam melakukan pengujian Uji *Paired Sample T-Test* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara (Sujarweni, 2016) yaitu:

1. Menggunakan Uji Signifikansi. Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho:
  - a. Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak
  - b. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima
2. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel.
  - a. Apabila nilai t hitung < t table dan t hitung > t table maka Ho ditolak
  - b. Apabila nilai -t tabel < t hitung < t table maka Ho diterima

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskriptif Data Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) BPR. Seluruh BPR tersebut dalam rencana awal akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian sehingga semua anggota populasi merupakan sampel penelitian (sampel jenuh). Namun demikian, pada proses pengumpulan data diketahui bahwa terdapat 1 (satu) BPR yang berdiri di bulan Oktober 2013 dan 3 (tiga) BPR yang berdiri tahun 2014.

4.1.2. Analisis Statistik Penelitian

a. CAR

Tabel 1. Statistik Deskriptif CAR

	N	Minimum	Maximum	Mean		Sid. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
CAR_Pra	45	8,18	82,34	25,1991	2,08578	13,99183
CAR_Pasca	45	10,30	137,77	33,5376	3,77857	25,34743
Valid N (listwise)	45					

Berdasarkan tabel 1, di Provinsi Jambi rata-rata CAR BPR sebelum penerapan tata kelola sebesar 25,20% dan CAR setelah penerapan tata kelola sebesar 33,54% atau terjadi peningkatan rata-rata CAR dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

b. Rasio KAP

Tabel 2. Statistik Deskriptif KAP

	N	Minimum	Maximum	Mean		Sid. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
KAP_Pra	45	,81	16,68	6,2429	,67615	4,53577
KAP_Pasca	45	,32	24,99	7,7664	,64846	4,34998
Valid N (listwise)	45					

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata Rasio KAP sebelum penerapan tata kelola sebesar 6,24% dan Rasio KAP setelah penerapan tata kelola sebesar 7,76% atau terjadi peningkatan rata-rata Rasio KAP dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

c. Rasio NPL Net

Tabel 3. Statistik Deskriptif NPL Net

	N	Minimum	Maximum	Mean		Sid. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
NPL_Net_Pra	45	,59	20,24	6,1400	,61566	4,12995
NPL_Net_Pasca	45	,15	28,48	7,6029	,78034	5,25470
Valid N (listwise)	45					

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata Rasio NPL Net sebelum penerapan tata kelola sebesar 6,14% dan Rasio NPL

Net setelah penerapan tata kelola sebesar 7,60% atau terjadi peningkatan rata-rata rasio NPL Net dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

d. Rasio ROA

**Tabel 4. Statistik Deskriptif ROA**

	N	Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation
		Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	
ROA_Pra	45	-6,77	17,75	3,5609	,64369	4,31803		
ROA_Pasca	45	-9,04	12,88	3,0027	,59947	4,02139		
Valid N (listwise)	45							

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata Rasio ROA sebelum penerapan tata kelola sebesar 3,56% dan Rasio ROA setelah penerapan tata kelola sebesar 3,00% atau terjadi penurunan rata-rata Rasio ROA dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

e. Rasio BOPO

**Tabel 5. Statistik Deskriptif BOPO**

	N	Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation
		Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	
BOPO_Pra	45	51,20	122,48	83,9571	2,55199	17,11925		
BOPO_Pasca	45	58,53	147,49	86,5198	2,82712	18,96489		
Valid N (listwise)	45							

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata Rasio BOPO sebelum penerapan tata kelola sebesar 83,96% dan Rasio BOPO setelah penerapan tata kelola sebesar 86,52% atau terjadi peningkatan rata-rata Rasio BOPO dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

f. Loan to Deposit Ratio (LDR)

**Tabel 6 Statistik Deskriptif LDR**

	N	Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation
		Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	
LDR_Pra	45	63,35	94,68	79,5500	1,20451	8,08008		
LDR_Pasca	45	58,52	132,13	78,2678	1,83897	12,33618		
Valid N (listwise)	45							

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata LDR sebelum penerapan tata kelola sebesar 79,55% dan LDR setelah penerapan tata kelola sebesar 78,27% atau terjadi penurunan rata-rata LDR dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

g. Cash Ratio

**Tabel 7. Statistik Deskriptif CR**

	N	Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation
		Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	
CR_Pra	45	5,73	43,58	19,3209	1,59719	10,71429		
CR_Pasca	45	6,37	45,56	19,6578	1,43167	9,60393		
Valid N (listwise)	45							

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata CR sebelum penerapan tata kelola sebesar 19,32% dan CR setelah penerapan tata kelola sebesar 19,65% atau terjadi peningkatan rata-rata CR dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

4.1.3. Uji Normalitas

a. CAR

**Tabel 8. Uji Normalitas CAR**

		CAR_Pra	CAR_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	25,1991	33,5376
	Std. Deviation	13,99183	25,34743

Most Extreme Differences	Absolute	,328	,204
	Positive	,328	,204
	Negative	-,194	-,180
Test Statistic		,328	,204
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000	,000

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk CAR sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,328 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ) dan setelah penerapan tata kelola sebesar 0,204 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ) atau terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data CAR sebelum dan setelah penerapan tata kelola dinilai tidak normal.

b. Rasio KAP

**Tabel 9. Uji Normalitas KAP**

		KAP_Pra	KAP_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6,2429	7,7664
	Std. Deviation	4,53577	4,34998
Most Extreme Differences	Absolute	,125	,131
	Positive	,125	,131
	Negative	-,115	-,130
Test Statistic		,125	,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,075	,052

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk Rasio KAP sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,125 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,075 ( $p > 0,05$ ) dan setelah penerapan tata kelola sebesar 0,131 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,052 ( $p > 0,05$ ) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data Rasio KAP sebelum dan sesudah penerapan tata kelola juga dinilai normal.

c. Rasio NPL Net

**Tabel 10. Uji Normalitas NPL Net**

		NPL_Net_Pra	NPL_Net_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6,1400	7,6029
	Std. Deviation	4,12995	5,23470
Most Extreme Differences	Absolute	,089	,122
	Positive	,080	,122
	Negative	-,089	-,079
Test Statistic		,089	,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200	,090

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk Rasio *NPL Net* sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,089 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,200 ( $p > 0,05$ ) dan setelah penerapan tata kelola sebesar 0,122 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,090 ( $p > 0,05$ ) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data Rasio *NPL Net* setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.



d. Rasio ROA

**Tabel 11. Uji Normalitas ROA**

		ROA_Pra	ROA_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3,5609	3,0027
	Std. Deviation	4,31803	4,02139
Most Extreme Differences	Absolute	,127	,119
	Positive	,073	,072
	Negative	-,127	-,119
Test Statistic		,127	,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		,066	,114

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk Rasio ROA sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,127 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,066 ( $p > 0,05$ ) dan nilai *kolmogorov smirnov* untuk Rasio ROA setelah penerapan tata kelola sebesar 0,119 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,114 ( $p > 0,05$ ) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data Rasio ROA sebelum dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.

e. Rasio BOPO

**Tabel 12. Uji Normalitas BOPO**

		BOPO_Pra	BOPO_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	83,9571	86,5198
	Std. Deviation	17,11925	18,96489
Most Extreme Differences	Absolute	,124	,118
	Positive	,124	,118
	Negative	-,060	-,070
Test Statistic		,124	,118
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078	,127

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk Rasio BOPO sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,124 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,078 ( $p > 0,05$ ) dan nilai *kolmogorov smirnov* untuk Rasio BOPO setelah penerapan tata kelola sebesar 0,118 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,127 ( $p > 0,05$ ) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data Rasio BOPO sebelum dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.

f. Rasio LDR

**Tabel 13. Uji Normalitas LDR**

		LDR_Pra	LDR_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	79,5500	78,2678
	Std. Deviation	8,08008	12,33618
Most Extreme Differences	Absolute	,129	,128
	Positive	,129	,128
	Negative	-,072	-,062
Test Statistic		,129	,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,056	,061

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk LDR sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,129 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,056 ( $p > 0,05$ ) dan nilai *kolmogorov smirnov* untuk LDR setelah penerapan tata kelola sebesar 0,128 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,061 ( $p > 0,05$ ) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi

normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data LDR sebelum dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.

g. Rasio Cash Ratio

**Tabel 14. Uji Normalitas CR**

		CR_Pra	CR_Pasca
N		45	45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19,3209	19,6578
	Std. Deviation	10,71429	9,60393
Most Extreme Differences	Absolute	,130	,127
	Positive	,130	,127
	Negative	-,107	-,095
Test Statistic		,130	,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,056	,067

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai *kolmogorov smirnov* untuk CR sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,130 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,056 ( $p > 0,05$ ) dan nilai *kolmogorov smirnov* untuk CR setelah penerapan tata kelola sebesar 0,127 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,067 ( $p > 0,05$ ) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distribusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data CR sebelum dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.

4.14. Uji Paired Sample T-Test

a. CAR

**Tabel 15. Paired Sample T-Test Rasio KAP**

Pair 1	KAP_Pra - KAP_Pasca	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
		-1,52	5,95	,88	-3,31	,26	-1,719	44	,093

Tabel 15 memperlihatkan Nilai signifikansi (Sig) *Paired Samples T-Test* untuk Rasio KAP sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,093 > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t<sub>tabel</sub>. Nilai t<sub>hitung</sub> sebesar -1,719 < t<sub>tabel</sub> sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk Rasio KAP sebelum penerapan tata kelola dengan Rasio KAP setelah penerapan tata kelola.

b. Rasio NPL Net

**Tabel 16. Paired Sample T-Test Rasio NPL Net**

Pair 1	NPL_Net_Pra - NPL_Net_Pasca	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
		-1,46	6,51	,97	-3,42	,49	-1,508	44	,139

Tabel 16 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) *Paired Samples T-Test* untuk Rasio NPL Net sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,139 > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t<sub>tabel</sub>. Nilai t<sub>hitung</sub> sebesar -1,508 < t<sub>tabel</sub> sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk Rasio NPL Net

sebelum penerapan tata kelola dengan Rasio *NPL Net* setelah penerapan tata kelola.

c. Rasio ROA

**Tabel 17. Paired Sample T-Test Rasio ROA**

Pair 1	ROA_Pra - ROA_Pasca	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
		.56	5,66	,84	-1,14	2,26	,661	44	,512

Tabel 17 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) *Paired Samples T-Test* untuk Rasio *ROA* sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,512 > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t-tabel. Nilai t hitung sebesar 0,661 < t-tabel sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk Rasio *ROA* sebelum penerapan tata kelola dengan Rasio *ROA* setelah penerapan tata kelola.

d. Rasio BOPO

**Tabel 18. Paired Sample T-Test Rasio BOPO**

Pair 1	BOPO_Pra - BOPO_Pasca	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
		-2,56	26,02	3,88	-10,38	5,25	,661	44	,512

Tabel 18 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) *Paired Samples T-Test* untuk Rasio *BOPO* sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,512 > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t-tabel. Nilai t hitung sebesar -0,661 < t-tabel sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk Rasio *BOPO* sebelum penerapan tata kelola dengan Rasio *BOPO* setelah penerapan tata kelola.

e. Rasio LDR

**Tabel 19. Paired Sample T-Test Rasio LDR**

Pair 1	LDR_Pra - LDR_Pasca	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
		1,28	15,03	2,24	-3,23	5,79	,572	44	,570

Tabel 19 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) *Paired Samples T-Test* untuk LDR sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,570 > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t-tabel. Nilai t hitung sebesar 0,572 < t-tabel sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk LDR sebelum penerapan tata kelola dengan LDR setelah penerapan tata kelola.

f. Rasio CR

**Tabel 20. Paired Sample T-Test Rasio CR**

Pair 1	CR_Pra - CR_Pasca	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
		-.34	12,36	1,84	-4,05	3,37	,183	44	,856

Tabel 20 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) *Paired Samples T-Test* untuk LDR sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,856 > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t-tabel. Nilai t hitung sebesar -0,183 < t-tabel sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk CR sebelum penerapan tata kelola dengan CR setelah penerapan tata kelola.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kinerja Keuangan BPR Di Provinsi Jambi Sebelum dan setelah penerapan Tata kelola

**Tabel 21. Kinerja Keuangan 15 BPR**

NO	Pos Keuangan	Jumlah 2013 sd 2015	rata2 2013-2015	Jumlah 2016 sd 2018	rata2 2016-2018	(%)
1	Asset	2.066.463.711	688.821.237	2.100.784.207	700.261.402	1,66
2	Kredit	1.492.026.063	497.342.021	1.500.948.472	500.316.157	0,60
3	Tabungan	244.658.783	81.552.928	291.666.206	97.222.069	19,21
4	Deposito	1.299.854.762	433.284.921	1.244.851.843	414.950.614	-4,23
5	total DPK	1.544.513.545	514.837.848	1.536.518.049	512.172.683	-0,52
6	Laba	90.547.358	30.182.453	92.077.682	30.692.561	1,69

Data-data diatas memperlihatkan pertumbuhan pos-pos keuangan penting 15 BPR dalam periode terlihat bahwa secara umum dalam kurun waktu sebelum dan sesudah penerapan tata kelola, pos-pos keuangan penting tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan bahkan ada yang menurun kecuali tabungan. Kredit di BPR tidak banyak meningkat salah satunya dikarenakan tingginya persaingan dan adanya kredit program dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yang diperuntukkan kepada nasabah UMKM. Tabungan meningkat dikarenakan masyarakat khususnya disekitaran BPR mulai merasakan manfaat menabung di BPR. Penurunan deposito, lebih kepada upaya BPR untuk menurunkan jumlah dana pihak ketiga dengan biaya dana yang tinggi. Sementara itu, laba dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang menurun dipengaruhi oleh tingginya *NPL* sehingga mengurangi pendapatan bunga dan tingginya beban operasional BPR.

4.2.2. Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata kelola

a. Perbandingan Kinerja Keuangan-Rasio KAP

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan rasio KAP pada BPR di Provinsi Jambi. Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari rasio KAP sebelum dan sesudah penerapan tata kelola untuk di BPR dikarenakan rata-rata rasio KAP setelah penerapan tata kelola sebesar 7,76% (memburuk) lebih besar

dibandingkan rata-rata rasio KAP sebelum penerapan tata kelola sebesar 6,24%. Peningkatan rasio KAP sejalan dengan peningkatan rasio NPL, dikarenakan mayoritas aktiva produktif yang dimiliki BPR dalam bentuk kredit sehingga ketika NPL meningkat maka rasio KAP juga akan meningkat.

Teori keagenan memperlihatkan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dengan para Direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham dalam menjalankan kegiatan usahanya. Direksi sebagai pelaksana kegiatan memiliki informasi, data dan diberikan tanggung jawab dalam mengambil keputusan bisnis di BPR. Hal tersebut diperkenankan sepanjang keputusan yang diambil tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi dan atau membuat kinerja BPR kedepannya menjadi lebih buruk.

Ketentuan tata kelola yang diterbitkan oleh OJK, dengan mencakup seluruh aspek dan prinsip-prinsip tata kelola dimaksudkan agar ada fungsi perencanaan, fungsi manajerial/pengelolaan dan fungsi pengawasan sehingga upaya-upaya pencapaian target dan peningkatan kinerja BPR dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan diawasi dengan baik dan maksimal oleh internal dan eksternal BPR dengan harapan adanya peningkatan kinerja keuangan BPR.

#### b. Perbandingan Kinerja Keuangan- Rasio *NPL Net*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan rasio *NPL Net* pada BPR di Provinsi Jambi. Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari rasio *NPL Net* sebelum dan sesudah penerapan tata kelola untuk di BPR dikarenakan rata-rata rasio *NPL Net* setelah penerapan tata kelola sebesar 7,60% lebih besar (memburuk) dibandingkan rata-rata rasio *NPL Net* sebelum penerapan tata kelola sebesar 6,14%. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari eksternal maupun dari internal BPR. Dari eksternal, turunnya harga komoditi sawit dan karet sebagai komoditi unggulan dalam kurun waktu periode penelitian membuat nasabah atau debitur BPR kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajiban sehingga menyebabkan tingginya tunggakan yang berakibat *NPL* tetap tinggi. Selain itu, turunnya harga komoditi unggulan juga mempengaruhi daya beli masyarakat di Provinsi Jambi berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, pariwisata dan jasa serta menurunnya daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi peningkatan *NPL* BPR di Provinsi Jambi. Dari faktor internal, mungkin saja dipengaruhi oleh kualitas analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR. Dalam penyaluran kredit, setiap bank diminta menjalankan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh aspek khususnya 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of*

*Economic, dan Collateral*). Apabila analisis pembiayaan belum sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek di atas, maka akan berpotensi meningkatkan risiko kredit dan risiko operasional bank, salah satunya menjadikan *NPL* meningkat.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Pratomo & Sari, 2014) bahwa Kinerja Keuangan Bank Pemerintah (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara) dari variable *NPL* mengalami perbedaan. Jumlah kredit yang meningkat tetap memerlukan pengawasan kualitas kredit yang baik, terlihat dari setelah penerapan GCG, *NPL* di BNI, BRI, dan BTN mengalami penurunan sementara rasio *NPL* Bank Mandiri mengalami peningkatan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak berpengaruh secara signifikan pada Bank Mandiri. Pelaksanaan GCG oleh bank dapat meminimalkan adanya penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu dalam memberikan kredit yang tidak berkualitas untuk mencapai target kredit dan atau kepentingan lainnya.

*NPL* yang tinggi membuat beban cadangan pembentukan penyisihan aktiva produktif BPR menjadi lebih tinggi sehingga mempengaruhi rentabilitas dan permodalan BPR. Selain itu, *NPL* yang tinggi dapat memperburuk rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sehingga berpengaruh pada tingkat kesehatan BPR. Penerapan tata kelola (GCG) di BPR dengan memenuhi seluruh aspek dan prinsip-prinsip tata kelola baik *governance structure, governance process dan governance outcome* diharapkan dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menjaga dan menurunkan *NPL* BPR.

#### c. Perbandingan Kinerja Keuangan- Rasio (*ROA*)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan rasio *ROA* pada BPR di Provinsi Jambi. Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari rasio *ROA* sebelum dan sesudah penerapan tata kelola untuk di BPR dikarenakan rata-rata rasio *ROA* setelah penerapan tata kelola sebesar 3,01% lebih kecil (menurun) dibandingkan rata-rata rasio *ROA* sebelum penerapan tata kelola sebesar 3,56%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan rata-rata kredit BPR di Provinsi Jambi antara periode sebelum dan periode setelah penerapan tata kelola relative kecil yaitu sebesar 0,60% yang berdampak pada pertumbuhan laba hanya sebesar 1,69%. Pertumbuhan laba tersebut tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan rata-rata asset yang tumbuh 1,66%.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Pratomo & Sari, 2014) bahwa Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) dari variable *ROA* sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tidak mengalami perbedaan. Namun demikian dalam penelitian yang

sama, Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara dari variable ROA sebelum dan sesudah penerapan tata kelola mengalami perbedaan. Hal yang sama diungkapkan oleh (Zamani & Moeljadi, 2012) yang meneliti bahwa adanya peningkatan kinerja perusahaan dilihat dari ROA antara sebelum dan sesudah penerapan GCG.

Pertumbuhan ROA bergantung pada strategi manajemen dalam peningkatan jumlah aktiva produktif kualitas lancar, penyusunan rencana bisnis, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Semakin baik pelaksanaan tata kelola, diharapkan BPR semakin dapat bersaing dengan industry keuangan lainnya dengan terus meningkatkan asset yang dikelola sehingga ROA BPR menjadi semakin meningkat.

d. Perbandingan Kinerja Keuangan- Rasio BOPO

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan rasio BOPO pada BPR di Provinsi Jambi. Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari rasio BOPO sebelum dan sesudah penerapan tata kelola untuk di BPR dikarenakan rata-rata rasio BOPO setelah penerapan tata kelola sebesar 86,52% lebih besar dibandingkan rata-rata rasio BOPO sebelum penerapan tata kelola sebesar 83,96%. Tingginya rasio BOPO disebabkan oleh tingginya beban operasional khususnya beban cadangan PPAP akibat meningkatnya NPL BPR dan menurunnya pendapatan operasional berupa penurunan pendapatan bunga dan koreksi pendapatan bunga yang diterima (accrual). Selain itu, beban operasional yang tinggi juga dipengaruhi adanya peningkatan beban bunga dana pihak ketiga bukan bank berupa deposito mengikat mayoritas dana pihak ketiga yang dimiliki BPR merupakan dana yang bersumber dari dana mahal. Hal lain adalah, kewajiban pemenuhan struktur dalam ketentuan tata kelola, misalnya kelengkapan Direksi dan Dewan Komisaris, pemenuhan pejabat eksekutif yang membawahi kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit, menambah beban operasional BPR menjadi lebih besar namun belum didukung dengan optimalisasi peningkatan kredit yang memadai.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Pratomo & Sari, 2014) bahwa Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) dari variable BOPO sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tidak mengalami perbedaan. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan BOPO pada Bank Mandiri dan BNI dalam periode penelitian telah dikelola dengan baik untuk periode sebelum dan setelah penerapan tata kelola. Namun demikian dalam penelitian yang sama, Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara dari variable BOPO sebelum dan sesudah penerapan

tata kelola mengalami perbedaan yang mungkin disebabkan pengaruh penerapan GCG menyebabkan adanya efisiensi biaya sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.

e. Perbandingan Kinerja Keuangan- LDR

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan LDR pada BPR di Provinsi Jambi.

Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari LDR sebelum dan sesudah penerapan tata kelola untuk di BPR dikarenakan rata-rata LDR setelah penerapan tata kelola sebesar 78,27% lebih kecil dibandingkan rata-rata LDR sebelum penerapan tata kelola sebesar 79,55%. Dari perbandingan LDR pada 2 periode tersebut, terlihat bahwa rata-rata LDR BPR di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda. Hal ini memperlihatkan penerapan tata kelola tidak menjadikan BPR lebih agresif dalam penyaluran kredit. Jika dilihat dari pertumbuhan kredit, maka selisih jumlah kredit seluruh BPR di Provinsi Jambi dalam periode penelitian, hanya tumbuh sebesar 0,60%. Sementara itu jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki BPR dalam periode penelitian yang sama, turun 0,52%. Sesuai dengan ketentuan tingkat kesehatan BPR, komponen perhitungan LDR BPR ditambahkan dengan modal inti yang dimiliki BPR. Dengan melihat rata-rata yang tidak jauh berbeda dan cenderung menurun, memperlihatkan pertumbuhan modal inti juga tidak signifikan sehingga perhitungan rata-rata LDR untuk keseluruhan BPR tidak jauh berbeda.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Pratomo & Sari, 2014) bahwa Kinerja Keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia dari variable LDR sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tidak mengalami perbedaan. Namun demikian dalam penelitian yang sama, Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara dari variable LDR sebelum dan sesudah penerapan tata kelola mengalami perbedaan. Dalam penelitiannya, (Pratomo & Sari, 2014) menyatakan bahwa dengan adanya penambahan kredit maka bank berpeluang mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Hal ini seiring dengan manfaat GCG guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan agar nasabah mempercayai bank sebagai tempat menyimpan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

LDR BPR masih dapat dioptimalkan sehingga dapat mencapai nilai maksimum sebesar 94,75% dengan tetap memperhatikan jumlah dan rasio permodalan dan rasio likuiditas serta menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan tata kelola di BPR, seiring dengan berjalannya waktu dan kelengkapan struktur dan

infrastruktur yang ada, perbaikan *governance process* dalam pengelolaan bank diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih maksimal bagi BPR.

f. Perbandingan Kinerja Keuangan-CR

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan CR pada BPR di Provinsi Jambi. Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari *Cash Ratio* sebelum dan sesudah penerapan tata kelola untuk di BPR dikarenakan rata-rata *Cash Ratio* setelah penerapan tata kelola sebesar 19,66% sedikit di atas rata-rata *Cash Ratio* sebelum penerapan tata kelola sebesar 19,32%. Perbandingan *Cash Ratio* tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata *Cash Ratio* BPR di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda. *Cash Ratio* ini memperlihatkan penerapan tata kelola tidak menjadikan BPR lebih berani memaksimalkan dana yang ada untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. *Cash Ratio* merupakan salah satu komponen likuiditas yang harus dijaga oleh BPR. Saat ini ketentuan minimal yang harus di jaga adalah sebesar 6%. Tingginya rasio, menunjukkan BPR belum mengambil risiko yang lebih tinggi yang berarti tetap mengupayakan keamanan dan kenyamanan dalam mengelola likuiditas guna menjaga kepercayaan nasabah. Meskipun hal ini dinilai baik, namun BPR berpotensi kehilangan sedikit penghasilan dari penempatan dana yang seharusnya dapat ditempatkan pada aktiva produktif dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari, 2009) bahwa Kinerja Keuangan pada PT Petrokimia Gresik dari variable *Cash Ratio* sebelum dan sesudah penerapan GCG tidak mengalami perbedaan. Hasil yang tidak signifikan, dimungkinkan karena penerapan GCG pada PT Petrokimia Gresik yang hanya digunakan sebagai sampel adalah 1 (satu) tahun sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah.

*Cash Ratio* BPR merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan likuiditas. Penerapan tata kelola, khususnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dan penyusunan rencana bisnis diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan BPR dalam mengelola likuiditas dan memaksimalkan rentabilitas sehingga penerapan tata kelola dinilai mampu untuk meningkatkan kinerja BPR.

4.2.3. Indeks Tata Kelola

Indeks penerapan tata kelola secara keseluruhan baik sebelum dan sesudah penerapan tata kelola dengan 10 indikator, nilai indeks terendah sebesar 57,04% tahun 2013 dan terus meningkat hingga akhir tahun 2018 tercatat sebesar 93,20%. Hal ini memperlihatkan kepatuhan BPR dalam rangka memenuhi ketentuan tata

kelola sangat baik. Dengan demikian, diharapkan setelah BPR memenuhi ketentuan tersebut, maka bisnis yang dilakukan semakin lebih baik dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Simpulan penelitian ini secara umum adalah peningkatan kinerja keuangan 15 (lima belas) BPR yang dijadikan sampel dinilai tidak signifikan dan berpengaruh pada rasio-rasio kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi yang juga tidak banyak mengalami perubahan sehingga penerapan tata kelola pada 3 tahun pertama penerapan tata kelola tidak membuat adanya perbedaan kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi. Namun demikian, hasil survey memperlihatkan adanya peningkatan kepatuhan BPR dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

- 1) Perkembangan kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi khususnya 15 BPR yang dijadikan sampel dinilai tidak mengalami perkembangan yang signifikan khususnya pada pos-pos keuangan penting berupa asset, kredit, dana pihak ketiga dan laba rugi yang tumbuh hanya dibawah 2% kecuali pos tabungan yang meningkat cukup baik.
- 2) Hasil Uji *Paired Sample T-Test* yang melakukan pengujian kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan tata kelola, antara lain:
  - Kinerja Keuangan BPR dinilai dari Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio KAP sesudah penerapan tata kelola lebih besar (memburuk) dibandingkan dengan rata-rata rasio KAP sebelum penerapan tata kelola.
  - Kinerja Keuangan BPR dinilai dari Rasio *Non Performing Loan (NPL) Net* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio NPL Net sesudah penerapan tata kelola lebih besar (memburuk) dibandingkan dengan rata-rata rasio NPL Net sebelum penerapan tata kelola. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti turunnya harga komoditi unggulan daerah dan faktor internal seperti analisa pemberian kredit yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian.
  - Kinerja Keuangan BPR dinilai dari Rasio *Return on Asset (ROA)* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio ROA sesudah penerapan tata kelola lebih kecil (menurun)

- dibandingkan dengan rata-rata rasio ROA sebelum penerapan tata kelola. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kredit yang sangat kecil dalam periode penilaian sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan laba yang diterima BPR.
- Kinerja Keuangan BPR dinilai dari Rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio BOPO sesudah penerapan tata kelola lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio BOPO sebelum penerapan tata kelola. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan beban cadangan PPAP, beban bunga pihak ketiga bukan bank dan penurunan pendapatan bunga akibat besarnya jumlah NPL BPR.
  - Kinerja Keuangan BPR dinilai dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata LDR sesudah penerapan tata kelola lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata LDR sebelum penerapan tata kelola. LDR yang belum mencapai nilai maksimal memperlihatkan belum agresifnya penyaluran kredit oleh BPR dan jumlah dana pihak ketiga yang tidak jauh berubah dari periode sebelum dan sesudah penerapan tata kelola.
  - Kinerja Keuangan BPR dinilai dari *Cash Ratio (CR)* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata CR sesudah penerapan tata kelola hanya sedikit di atas rata-rata CR sebelum penerapan tata kelola atau tidak mengalami perubahan signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengambilan risiko oleh BPR dengan tetap menjaga nilai CR yang tinggi sehingga tetap dapat melayani penarikan dana nasabah dengan baik.
- 3) Indeks penerapan tata kelola secara keseluruhan baik sebelum dan sesudah penerapan tata kelola terus mengalami perbaikan yang memperlihatkan kepatuhan BPR dalam rangka memenuhi ketentuan tata kelola.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian selanjutnya hendaknya menambah dan memperbesar obyek penelitian misalnya untuk wilayah Sumatera dan atau Indonesia secara keseluruhan.

- 2) Penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal mengupayakan menambah periode penelitian menjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dengan memastikan data yang diperoleh dapat terkumpul secara keseluruhan.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pos-pos keuangan seperti asset, kredit, dana pihak ketiga dan laba rugi sebagai salah satu variabel tambahan dalam melakukan penelitian.
- 4) Bagi Pengurus BPR yang ada di Provinsi Jambi diharapkan agar dapat memaksimalkan peran dari sumber daya yang dimiliki dengan terpenuhinya pengurus, pejabat eksekutif yang membawahi kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit guna mendukung kinerja keuangan BPR menjadi lebih baik mengingat pemenuhan sumber daya manusia akan menambah beban operasional BPR.

## 5.3. Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan dari peneliti, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya terbatas pada BPR yang ada di Provinsi Jambi dengan jumlah yang terbatas, sehingga belum mendapatkan gambaran yang lebih umum dari penerapan tata kelola BPR di Indonesia.
- 2) Periode penelitian hanya selama 3 (tiga) tahun sebelum dan 3 (tiga) tahun sesudah penerapan ketentuan tata kelola.
- 3) Pada periode penelitian, di Provinsi Jambi yang mayoritas masyarakat sangat mengandalkan komoditi unggulan berupa tanaman karet dan sawit, merasakan penurunan pendapatan akibat harga yang sejak 2013 mengalami penurunan dan hingga saat ini belum stabil dana tau meningkat kembali. Kondisi ini mempengaruhi bisnis BPR di Provinsi Jambi yang mayoritas nasabahnya pada golongan menengah ke bawah.

## DAFTAR REFERENSI

- Anggarawal, P. (2013). Impact of Corporate Governance on Corporate Financial Performance. *IOSR Journal of Bussiness and Management (IOSR-JBM)*, 13(3 PP), 01–05.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- BI. (2007). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditian Rakyat*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of theFinn: Managerial Behavior, Agency Costs, and

- Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 No 4, 305–360. *Dan Bisnis Universitas Brawijaya.*
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Munawir, S. (2012). *Analisis Informasi Keuangan*. Liberty.
- OJK. (2015a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat*.
- OJK. (2015b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat*.
- OJK. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat*.
- Pratomo, W. A., & Sari, I. P. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Bank Milik Pemerintah Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Good Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2 Nomor 3.
- Sari, R. P. (2009). Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT Petro Kimia Gresik. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 9 No.2.
- Sujarweni, W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.
- UU No 10. (1998). *Perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan*.
- Wulaningrum, R. (2010). Analisis Tindakan Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Kebijakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Eksis Politehnik Negeri Samarinda*.
- [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com). (n.d.). *No Title*.
- [www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com). (n.d.). *No Title*.
- [www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id). (n.d.). *No Title*.
- [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id). (n.d.). *No Title*.
- [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com). (n.d.). *No Title*.
- [www.nasional.tempo.co.id](http://www.nasional.tempo.co.id). (n.d.). *No Title*.
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). (2019). *No Title*.
- Zamani, M. I. U., & Moeljadi. (2012). Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Negara Indonesia Tbk, dengan Rasio Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, dan Capital Adequacy Ratio. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*